

## BAB III

### GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN

#### A. Sejarah Aliansi Jurnalis Independen

Aliansi Jurnalis Independen (AJI) lahir sebagai perlawanan komunitas pers Indonesia terhadap kesewenang-wenangan rezim Orde Baru. Mulanya adalah pembredelan Detik, Editor dan Tempo, pada 21 Juni 1994. Ketiganya dibredel karena pemberitaannya yang tergolong kritis kepada penguasa. Tindakan refresif inilah yang memicu aksi solidaritas sekaligus perlawanan dari banyak kalangan secara merata disejumlah kota.<sup>1</sup>

Setelahnya, gerakan perlawanan tersebut mengkristal. Dengan kurang lebih 100 orang yang terdiri dari para jurnalis dan kolumnis berkumpul di Sirnagalih, Bogor, 7 Agustus 1994. Pada hari itulah mereka mendatangi Deklarasi Sirnagalih. Inti dari Deklarasi tersebut adalah menuntut dipenuhinya hak publik atas informasi, menentang pengekangan pers, menolak wadah tungga untuk jurnalis, serta mengumumkan berdirinya AJI. Dengan demikian pada tanggal 7 Agustus 1994 AJI Indonesia resmi berdiri.

Pembredelan 21 Juni 1994 membantu menciptakan momentum, yang dibutuhkan bagi lahirnya sebuah organisasi jurnalis alternatif. Pembredelan 21 Juni 1994 merupakan *shock therapy*, yang menjelma bendera penggalangan solidaritas

---

<sup>1</sup> Aliansi Jurnalis Independen, Sejarah AJI, <https://aji.or.id/read/sejarah.html> diakses pada 26 Maret 2019.

para jurnalis muda untuk mewujudkan mimpi yang sudah lama terpendam untuk membentuk wadah jurnalis yang independen.

Jauh sebelum pembredelan tiga media tersebut yaitu sekitar tahun 1991, terjadi pertemuan informal belasan jurnalis di Taman Ismail Marzuki, Menteng, Jakarta Pusat. Dalam pertemuan tersebut, dibicarakan berbagai hal yang menyangkut kondisi pers Indonesia. Dalam pertemuan itulah tercetus ide tentang perlunya membentuk organisasi jurnalis alternatif yang independen di luar PWI. Ada juga keinginan untuk membentuk media sendiri. Sayangnya, pembicaraan itu tidak berlanjut menjadi aksi konkret.

Di beberapa kota, sebelum berdirinya Aliansi Jurnalis Independen (AJI), sudah ada komunitas dan kelompok-kelompok diskusi jurnalis. Seperti di Surabaya ada *Surabaya Press Club* (SPC), Forum Wartawan Independen (FOWI) terdapat di Bandung, Forum Diskusi Wartawan Yogya (FDW) di Yogyakarta dan di Jakarta sendiri terdapat Solidaritas Jurnalis Independen (SJI). Kemudian para aktivitis jurnalis dari berbagai komunitas inilah yang kemudian ikut bergabung membentuk AJI.<sup>2</sup>

Berdirinya AJI memberi gaung cukup besar di dunia jurnalistik Indonesia. Tekanan terhadap para jurnalis yang terang-terangan bergabung dalam AJI sangat besar. Pemerintah melalui Deppan dan PWI melihat berdirinya AJI sebagai tantangan terbuka, yang harus ditindak keras agar tidak meluas. Berbagai tindakan

---

<sup>2</sup>Denny eR Ge, Sejarah AJI, [http://id.m.wikipedia.org/wiki/Aliansi\\_Jurnalis\\_Independen](http://id.m.wikipedia.org/wiki/Aliansi_Jurnalis_Independen) diakses pada 28 Maret 2019.

“pendisiplinan” melalui pemimpin di media masing-masing pun dilakukan.<sup>3</sup> Dikarenakan adanya tekanan yang dilakukan pemerintah melalui pimpinan media tersebut, organisasi ini melakukan gerakan dibawah tanah yang mana gerakan yang dilakukan secara sembunyi-sembunyi.

Pada masa Orde Baru, AJI masuk dalam daftar organisasi terlarang. Oleh karena itu, operasi organisasi ini bergerak di bawah tanah. Roda organisasi dijalankan oleh dua puluhan jurnalis-aktivis. Untuk menghindari tekanan aparat keamanan, sistem manajemen dan pengorganisasian diselenggarakan secara tertutup. Sistem kerja organisasi semacam itu memang sangat efektif untuk menjalankan misi organisasi, apalagi pada saat itu AJI hanya memiliki anggota kurang dari 200 jurnalis.

Gerakan bawah tanah ini menuntut biaya mahal. Tiga anggota AJI, yaitu Ahmad Taufik, Eko Maryadi dan Danang Kukuh Wardoyo dijebloskan ke penjara, Maret 1995. Taufik dan Eko masuk bui masing-masing selama 3 tahun, Danang 20 bulan. Menyusul kemudian Andi Syahputra, mitra penerbit AJI, yang masuk penjara selama 18 bulan sejak Oktober 1996.

Selain itu, para aktivis AJI yang bekerja di media dibatasi ruang geraknya. Pejabat Departemen Penerangan dan Persatuan Wartawan Indonesia juga tidak segan-segan menekan para pemimpin redaksi agar tidak memperkerjakan mereka di medianya. Konsistensi dalam memperjuangkan misi inilah yang menempatkan AJI

---

<sup>3</sup> Erwan Effendi & A. Rasyid, *Jurnalistik Praktis Kontemporer*, (Depok: Pranadamedia Group, 2017), hlm. 205.

berada dalam barisan kelompok yang mendorong demokratisasi dan menentang otoritarianisme. Inilah yang membuahkan pengakuan dari elemen gerakan pro demokrasi di Indonesia, sehingga AJI dikenal sebagai pembela kebebasan pers dan berekspresi.

Pengakuan tak hanya datang dari dalam negeri, tetapi juga dari manca negara. Diantaranya dari *International Federation of Journalist (IFJ)*, *Article XIX* dan *International Freedom Expression Exchange (IFEX)*. Ketiga organisasi internasional tersebut kemudian menjadi mitra kerja AJI. Selain itu banyak organisasi-organisasi asing, khususnya NGO internasional, yang mendukung aktivitas AJI. Termasuk badan-badan PBB yang berkantor di Indonesia.

AJI diterima secara resmi menjadi anggota IFJ, organisasi jurnalis terbesar dan paling berpengaruh di dunia, yang bermarkas di Brussels, Belgia, pada 18 Oktober 1995. Aktivistis lembaga ini juga mendapat beberapa penghargaan dari dunia internasional. Di antaranya dari *Committee to Protect Journalist (CPJ)*, *The Freedom Forum (AS)*, *International Press Institute (IPI-Wina)* dan *The Global Network of Editors and Media Executive (Zurich)*.

Dalam diskusi pleno 6 Agustus malam di Sirnagalih, forum akhirnya sepakat membentuk organisasi profesi jurnalis. Menurut Salomo Simanungkalit (Wartawan Kompas, yang juga penandatangan Deklarasi Sirnagalih), nama AJI itu sudah “ditimbang-timbang” dan disebut oleh Dhia Prekasha Yoedah. Nama itu terkesan

bagus, singkat, mudah disebut, mudah diingat, dan punya makna positif. AJI dalam mitologi Jawa berarti suatu ilmu atau kesaktian tertentu.

Untuk sebutan “Aliansi” diusulkan Stanley Adi Prasetyo, dasar pemikirannya, adalah untuk menghormati dan mengakui keberadaan komunitas-komunitas jurnalis, yang sudah lebih dulu ada di berbagai kota.

Istilah “Jurnalis” pun disepakati digunakan, karena itulah istilah yang dianggap lebih sesuai dengan kata asalnya dalam bahasa Inggris (*journalist*), dan untuk membedakan dari PWI yang sudah menggunakan “wartawan.”

Terakhir, istilah “Independen” digunakan untuk menggarisbawahi perbedaan AJI dengan PWI. AJI itu independen, dan juga tidak mau mengklaim mewakili “Indonesia.” Sedangkan, PWI tidak independen, tapi mengklaim mewakili Indonesia.

AJI adalah organisasi jurnalis alternatif. Kata “alternatif” perlu ditekankan, untuk membedakan dari sebutan “tandingan.” Istilah “tandingan” bermakna reaktif. Jika AJI sekadar tandingan dari PWI, maka eksistensi keberadaan AJI akan tergantung pada PWI. Jika PWI bubar, AJI juga harus bubar, karena kelahirannya hanyalah sebagai tandingan atau reaksi dari keberadaan PWI. Itulah sebabnya, sejak awal AJI tak pernah menyebut diri sebagai “tandingan PWI.”

Sedangkan, sebutan “alternatif” pada semangatnya adalah menerima pluralitas dan perbedaan, tidak memonopoli. “Alternatif” bagi AJI artinya bisa menerima adanya organisasi-organisasi lain.<sup>4</sup>

AJI Palembang adalah Aliansi Jurnalis Independen di wilayah kota Palembang. AJI Palembang didirikan pada 12 April 1998, dengan diprakarsai oleh beberapa tokoh, yakni Taufik Wijaya, Almarhum Hamzah, Tareh Rasyid dan Sutrisman Dina dengan tiga pilar perjuangan AJI yaitu kebebasan pers, profesionalitas jurnalis dan kesejahteraan jurnalis.

Begitu terbentuk, AJI Palembang langsung menyusun program kerja jangka panjang maupun jangka pendek. Namun berdirinya AJI Palembang ini tidak lantas mendapat persetujuan dari pemerintah. Butuh perjuangan berat bagi AJI Palembang untuk mendapatkan persetujuan dan legalisasi terhadap organisasi ini. Mengingat kala itu pemerintah sangat antipasti terhadap pers atau jurnalis yang berani membongkar kebobrokan pemerintah, termasuk AJI.

Selama perjuangan mendapatkan pengakuan dari pemerintah, AJI Palembang yang saat itu diketuai oleh Almarhum Taufik Wijaya banyak mendapatkan perlakuan tidak menyenangkan, di antaranya penganiayaan yang menimpa jurnalis anggota AJI Palembang. AJI Palembang protes namun tidak digubris pemerintah.

Setelah Presiden Soeharto tumbang, tampaknya angin segar akan menghampiri AJI Palembang. Namun ternyata angin segar tersebut tidak kunjung

---

<sup>4</sup>Denny ErGe, Pemilihan Nama Organisasi, [https://id.wikipedia.org/wiki/Aliansi\\_Jurnalis\\_Independen](https://id.wikipedia.org/wiki/Aliansi_Jurnalis_Independen) diakses pada 28 Maret 2019.

datang. Pengakuan dari pemerintah baru datang satu tahun kemudian. Pada 13 Mei 1999, SK dari pemerintah era Presiden BJ. Habibie akhirnya datang kepada AJI Palembang. Setelah diresmikan, AJI Palembang dapat leluasa menjalankan program kerja mereka. Amanat AJI pusat bagi AJI Kota di seluruh Indonesia turut dilaksanakan AJI Palembang dengan penuh tanggung jawab.

Sejak saat itu pulalah AJI Palembang turut melaksanakan program kerja AJI Pusat untuk diterapkan di daerah, khususnya di Kota Palembang<sup>5</sup>

Untuk lokasi kantor kesekretariatan Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Kota Palembang sebelumnya beralamat di Jalan Jenderal Sudirman No.1273 Simpang Sekip Pangkal Palembang. Kantor sekretariat ini berstatus sewa mulai dari Maret 2018 sampai dengan Maret 2019. Untuk sekarang kantor kesekretariatan AJI Palembang masih dalam proses pencarian tempat baru.<sup>6</sup>

Untuk melaksanakan program dalam skala kecil, AJI Palembang melakukan penggalang dana dari setiap anggotanya. Besaran dana tersebut ditentukan berdasarkan hasil kesepakatan bersama. Penggalangan dana pun dilakukan menjelang dilaksankannya program kerja tersebut.

Selain itu penggalangan dana juga berasal dari iuran anggota maupun usaha yang dilakukan AJI Palembang, seperti membentuk koperasi, dana sukarela masyarakat melalui program edukasi dan lain sebagainya.

---

<sup>5</sup> Wahyu Sapran, *Pengaruh Nilai Uji Kompetensi Jurnalis Terhadap Profesionalisme Kerja Dilapangan (Studi Kasus Aliansi Jurnalis Independen Kota Palembang)*, (Palembang: UIN Raden Fatah, 2018), hlm. 55-56.

<sup>6</sup> Yulia Savitri, Sekretaris AJI Palembang, *Wawancara Pribadi*, tanggal 3 April 2019.

Untuk program skala besar, seperti seminar nasional yang melibatkan seluruh AJI Kota di Indonesia, maka AJI Palembang mendapatkan bantuan dana AJI pusat. Untuk seminar nasional, AJI Palembang dan AJI Kota lainnya telah beberapa kali melaksakannya dan bantuan dana AJI pusat tersebut memang selalu direalisasikan.

### **B. Logo AJI**

Termuat dalam bab I pasal 3 anggaran dasar Aliansi Jurnalis Independen (AJI), AJI berlambangkan burung merpati dan pena dengan warna dasar ungu tua, yang dikombinasikan dengan tulisan Aliansi Jurnalis Independen. Pena bermakna bahwa profesi jurnalis harus independen, sedangkan burung berarti keleluasaan berekspresi dan berorganisasi.<sup>7</sup>

#### **Gambar 1.**

#### **Logo Aliansi Jurnalis Independen**



*Sumber: Dokumentasi AJI.*

---

<sup>7</sup> Yulia Savitri, Sekertaris AJI Palembang, Wawancara Pribadi, 1 Juni 2019.



### **C. Visi dan Misi AJI**

Sejak berdiri hingga saat ini, AJI memiliki kepedulian pada tiga isu utama. yang menjadi visi dan misi AJI dalam menjalankan organisasi.

#### **1. Visi**

Terwujudnya masyarakat demokratis yang menghormati hak berpendapat, hak berkumpul dan berserikat, melalui pers yang bebas dan profesional.

#### **2. Misi**

##### **a. Perjuangan Untuk Mempertahankan Kebebasan Pers**

Perjuangan untuk mempertahankan kebebasan pers merupakan pekerjaan rumah utama AJI hingga kini. Ancaman bagi kebebasan pers itu ditandai oleh kian maraknya kasus gugatan, baik pidana maupun perdata, terhadap pers setelah reformasi. Ini diperkuat oleh statistik kasus kekerasan terhadap jurnalis masih relative tinggi, meski statistik jumlah kasus yang dimiliki AJI cukup fluktuatif (tidak tetap).

##### **b. Meningkatkan Profesionalisme**

Menurut AJI, pers profesional merupakan prasyarat mutlak untuk membangun kultur pers yang sehat. Dengan adanya kualifikasi jurnalis semacam itulah pers di Indonesia bisa diharapkan untuk menjadi salah satu tiang penyangga demokrasi. Salah satu program penting AJI yang

berhubungan dengan etika adalah melakukan kampanye untuk menolak amplop atau pemberian dari nara sumber.

### c. Meningkatkan Kesejahteraan Jurnalis

Tema tentang kesejahteraan ini memang tergolong isu yang sangat ramai di media. Bagi AJI, kesadaran akan pentingnya isu ini sudah dimulai sejak Kongres AJI tahun 1997. Dalam kongres tersebut, dicetuskan untuk memberikan porsi layak kepada isu yang berhubungan dengan aspek ekonomi jurnalis. Salah satu bentuknya adalah dengan mendorong pembentukan serikat pekerja di masing-masing media.<sup>8</sup>

Berdasarkan ketiga hal diatas, semua itu merujuk pada persoalan nyata yang dihadapi jurnalis saat ini.

### D. Kode Etik Aliansi Jurnalis Independen (AJI)

Dalam menegakkan kemerdekaan pers dan memenuhi hak publik atas informasi, anggota AJI wajib mematuhi Kode Etik sebagai berikut :

1. Jurnalis menghormati hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar.
2. Jurnalis selalu menguji informasi dan hanya melaporkan fakta dan pendapat yang jelas sumbernya.
3. Jurnalis tidak mencampuradukkan fakta dan opini.

---

<sup>8</sup>Aliansi Jurnalis Independen, Program Kerja AJI, <https://aji.or.id/read/program-kerja.html> diakses pada 28 Maret 2019.

4. Jurnalis tidak menyembunyikan informasi penting yang berkaitan dengan kepentingan publik.
5. Jurnalis memberikan tempat bagi pihak yang tidak memiliki kemampuan dan kesempatan untuk menyuarakan pendapat mereka.
6. Jurnalis mempertahankan prinsip-prinsip kebebasan dan keberimbangan dalam peliputan, pemberitaan serta kritik dan komentar.
7. Jurnalis menolak segala bentuk campur tangan pihak manapun yang menghambat kebebasan pers dan independensi ruang berita.
8. Jurnalis menghindari konflik kepentingan.
9. Jurnalis menolak segala bentuk suap.
10. Jurnalis menggunakan cara yang etis dan profesional untuk memperoleh berita, gambar, dan dokumen.
11. Jurnalis segera meralat atau mencabut berita yang diketahuinya keliru atau tidak akurat disertai dengan permintaan maaf kepada publik.
12. Jurnalis melayani Hak Jawab dan Hak Koreksi secara proporsional.
13. Jurnalis tidak memanfaatkan posisi dan informasi yang dimilikinya untuk mencari keuntungan pribadi.
14. Jurnalis tidak menjiplak.
15. Jurnalis menolak praktik-praktik pelanggaran etika oleh jurnalis lainnya.
16. Jurnalis menolak kebencian, prasangka, sikap merendahkan, diskriminasi, dalam masalah suku, ras, bangsa, jenis kelamin, orientasi seksual, bahasa,

agama, pandangan politik, orang berkebutuhan khusus atau latar belakang sosial lainnya.

17. Jurnalis menghormati hak narasumber untuk memberikan informasi latar belakang, *off the record*, dan embargo.
18. Jurnalis menjaga kerahasiaan sumber informasi konfidensial, identitas korban kejahatan seksual, dan pelaku serta korban tindak pidana di bawah umur.
19. Jurnalis menghormati privasi, kecuali untuk kepentingan publik.
20. Jurnalis tidak menyajikan berita atau karya jurnalistik dengan mengumbar kecabulan, kekejaman, kekerasan fisik dan psikologis serta kejahatan seksual.
21. Jurnalis menjunjung tinggi asas praduga tak bersalah, tidak beritikad buruk, menghindari fitnah, pencemaran nama dan pembunuhan karakter.<sup>9</sup>

## **E. Struktur Kepengurusan dan Anggota**

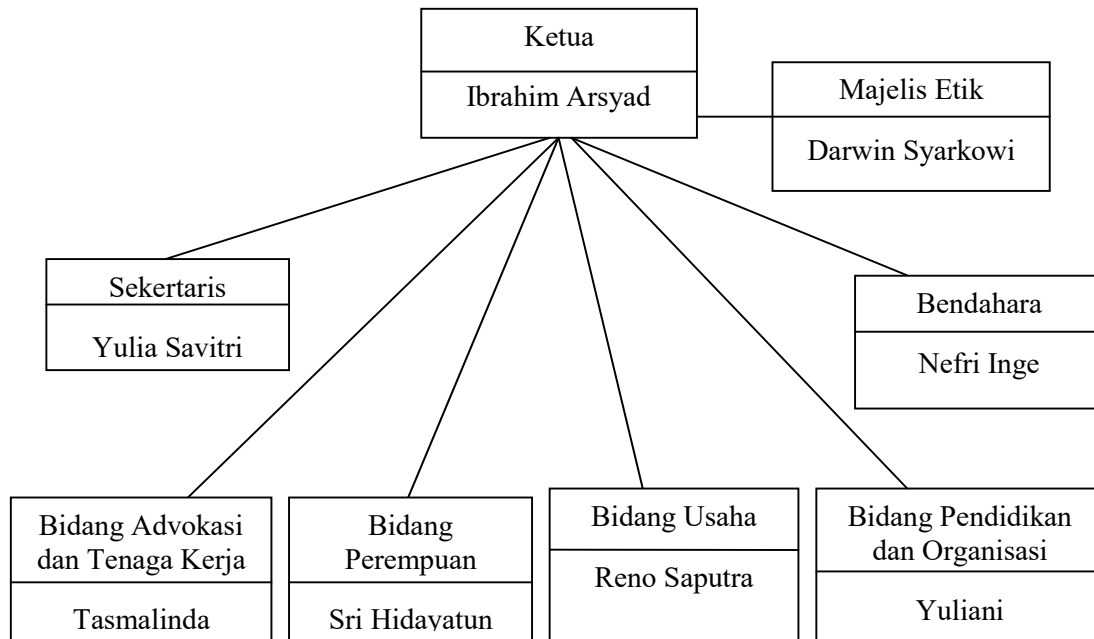
### **1. Struktur Kepengurusan**

Berikut ini gambar struktur kepengurusan AJI Kota Palembang pada periode 2016-2019:

---

<sup>9</sup>Aliansi Jurnalis Independen, kode Etik AJI, <https://aji.or.id/read/kode-etik.html> diakses pada 28 Maret 2019.

**Bagan 1.**  
**Struktur Kepengurusan AJI Kota Palembang**



*Sumber: AJI Kota Palembang.*

Begitulah struktur kepengurusan AJI Palembang, masa kepemimpinan Ibrahim Arsyad periode 2016-2019.

## 2. Anggota AJI Palembang

Berikut keterangan data anggota AJI Palembang April 2019.

### a. Keanggotaan

No	Anggota AJI Palembang	Jumlah
1	Anggota Laki-laki	17 Orang
2	Anggota Perempuan	10 Orang
3	Calon Anggota (belum pengukuhan)	8 Orang
Total		27 Orang

b. Sebaran Anggota AJI Palembang

1) Berdasarkan lingkup media

Anggota AJI Palembang yaitu terdiri dari orang-orang yang bernaung di media lokal dan media nasional. Yang mana media lokal sebanyak 22 orang, sedangkan media nasional yaitu sebanyak 5 orang.

2) Berdasarkan jenis media

Anggota AJI Palembang merupakan orang-orang yang bernaung di beberapa jenis media yaitu media cetak, radio dan online. Dimana yang bernaung di media cetak sebanyak 8 orang, media radio sebanyak 1 orang, dan media online sebanyak 18 orang.<sup>10</sup>

---

<sup>10</sup> Sumber: data arsip AJI Palembang, April 2019.